BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum di Indonesia yang dapat melakukan kegiatan usaha secara berkesinambungan untuk mendapatkan keuntungan.¹ Perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha membutuhkan modal yang cukup. Selain daripada modal, perusahaan mendapatkan sumber pembiayaan lainnya diperoleh dengan melakukan peminjaman utang kepada pemberi pinjaman (kreditor).² Kegiatan pemberian pinjaman tersebut seringkali dikenal dengan utang-piutang dimana perlu adanya kesepakatan yang mengikat antara peminjam (debitor) dengan pemberi pinjaman (kreditor).³

Namun dalam implementasinya tidak sedikit perusahaan mengalami kondisi keuangan yang menurun. Perusahaan yang didirikan mungkin saja mengalami masa-masa sulit sehingga berpengaruh dalam pemenuhan prestasi terhadap kreditornya sehingga berjalan tidak sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya kreditor berhak mengajukan permohonan pailit debitor yang utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴

¹ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 15

² Muhammad Bayu Hermawan, dalam Tesis berjudul "*Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren*", Universitas Trisakti, 2019

³ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 2008, hlm. 18

⁴ Yusuf Dhanu Al Azhar, dalam Jurnal berjudul "*Pembatalan Perjanjian Perdamaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Universitas Muhammadiyah Jember, 2020

Ketentuan mengenai kepailitan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan dan PKPU) yang menjelaskan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan Debitor Pailit yang dimana pengurusan dan pemberesannya dikerjakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sebelum tahapan pailit, pada umumnya langkah yang ditempuh apabila suatu perusahaan yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada kreditornya adalah dengan melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). PKPU adalah wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.⁵

Kemudian Pasal 265 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa setelah pengajuan PKPU debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor.⁶ Rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh debitor, hal ini dikarenakan sebagai bentuk penawaran dari debitor kepada para kreditor terkait dimungkinkan adanya restrukturisasi utang dalam rencana perdamaian tersebut.

⁵ Susanti Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 271

⁶ *Ibid.*, hlm. 295

Rencana perdamaian atau proposal perdamaian yang telah disepakati tidak dapat langsung dilaksanakan, melainkan perlu mendapatkan pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga yang berwenang. Proposal perdamaian yang telah disahkan kemudian disebut sebagai perjanjian perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.⁷

Dalam implementasinya terdapat banyak cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah ditempuh melalui mekanisme PKPU antara debitor dan kreditor. Dalam hal debitor tidak melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian, maka menurut Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, *“Pembatalan suatu perdamaian dapat diajukan oleh kreditor apabila debitor lalai dalam pemenuhan isi perdamaian tersebut.”*

Kemudian dalam Pasal 291 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, *“Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian debitor juga harus dinyatakan pailit.”*

Berdasarkan isi Pasal 171 Undang-undang Kepailitan dan PKPU bahwa permohonan pembatalan perdamaian diajukan dengan cara yang sama sebagaimana pengajuan permohonan pernyataan pailit. Dalam pengajuan permohonan pailit terdapat syarat yang menjadi ukuran suatu permohonan pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga.

⁷ *Ibid*, hlm. 298

Syarat pengajuan permohonan kepailitan ini dibuat dengan ketat dengan alasan agar tidak terjadi keadaan yang tidak berdasar dalam pengajuan permohonan yang menyebabkan pemohon dengan mudah mengajukan permohonan pailit yang menyebabkan sistem perekonomian menjadi rentan terhadap ketidakseimbangan ekonomi.⁸ Syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sebagai contoh kasus pada penelitian ini PT Prakarsa Semesta Alam selaku debitor (selanjutnya disebut Termohon) dengan PT Tamara Properti Indonesia selaku kreditor (selanjutnya disebut Pemohon). Pada kasus tersebut debitor dinilai telah lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati dengan PT Tamara Properti Indonesia dan kreditor lainnya.

Kasus ini bermula setelah adanya putusan perkara nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. mengenai dikabulkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor lain terhadap Termohon. Kemudian setelah disepakati restrukturisasi utang dalam perjanjian perdamaian, Termohon sampai dengan permohonan ini diajukan tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi perjanjian perdamaian. Sehingga PT Tamara Properti Indonesia mengajukan permohonan pembatalan

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 127

perdamaian kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Dalam jawaban yang Termohon ajukan menyatakan bahwa Termohon mengaku telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian dan mengaku sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon.

Namun Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan fakta sederhana dalam permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Niaga menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon.

Atas putusan penolakan permohonan pembatalan perdamaian pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian PT Tamara Properti Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022 mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan serta menyatakan pailit terhadap PT Prakarsa Semesta Alam dengan segala akibat hukumnya.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1. Skripsi, Alifah Zhecarina Kadang yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-Pembatalan*

Perdamaian/2019/PN.Niaga Jkt. Pst. Jo. Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”, analisis skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pada putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat beberapa hal yang berbenturan dengan Pasal 1338, Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal 130 ayat (2) HIR. Sementara pada putusan tingkat kasasi telah relevan dengan peraturan perundang-undangan.⁹

2. Skripsi, Adelia Nawakartika yang berjudul “*Pembatalan Homologasi Perdamaian Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk*”, dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan. Majelis Hakim Niaga mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan. Kemudian debitor mengajukan kasasi dengan eksepsi *diskualifikasi in person*, namun dalam putusnya Majelis Hakim Agung menolak permohonan pembatalan perdamaian tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan pada penelitian-penelitian terdahulu, bahwa peneliti terdahulu membahas mengenai akibat hukum kepailitan sampai dengan pemberesan harta pailit serta mengenai *diskualifikasi in person*, sedangkan penelitian yang akan

⁹ Alifah Zhecarina Kadang, dalam Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga Jkt. Pst. Jo. Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

¹⁰ Adelia Nawakartika, dalam Skripsi yang berjudul “*Pembatalan Homologasi Perdamaian Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada pelaksanaan pembatalan perjanjian perdamaian dan pembuktian sederhana. Peneliti merasa hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor: 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022)”**.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti berhasil mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan perjanjian perdamaian menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? (Studi putusan nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022)
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait kasus antara PT Tamara Properti Indonesia dengan PT Prakarsa Semesta Alam dalam putusan nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatalan perjanjian perdamaian menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus antara PT Tamara Properti Indonesia dengan PT Prakarsa Semesta Alam dalam putusan nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

- a. Sebagai sumbangan untuk keperluan pengetahuan hukum dan bahan rujukan kepastakaan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada khususnya.
- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Sebagai masukan bagi kepastian hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama terkait kejelasan pelaksanaan perjanjian perdamaian.
- d. Sebagai referensi bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut dalam permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara umum dengan adanya kajian ini peneliti berharap dapat memberikan informasi kepada para pembaca skripsi ini sehingga dapat

menambah pengetahuan tentang kepailitan dan PKPU. Bagi mereka yang berpraktik hukum, seperti hakim ketika memberikan putusan suatu perkara, dimungkinkan untuk menjaga integritas hukum sehingga putusan yang bersangkutan dapat memberikan nilai dan mencapai tujuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan Kepastian Hukum *Theory* yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹¹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih serta tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Isi pasal tersebut merupakan prinsip pembuktian secara sederhana dalam penyelesaian perkara kepailitan. Konsep kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana.

Kajian teori kepastian hukum sehubungan dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memberikan jaminan kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

terpenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Apabila debitor wanprestasi maka seluruh harta kekayaan debitor pailit akan menjadi jaminan seluruh utangnya (*debt guarantee*).¹²

Kemudian dalam perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Makna dari asas *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian yang telah berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Jika dikaitkan dengan hukum positif maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya suatu peraturan hukum.¹⁴

Secara yuridis asas *pacta sunt servanda* diakui keberadaannya dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian

¹² Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 20

¹³ Septarina Budiwati, dalam Jurnal yang berjudul “*Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens*”, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban. Perjanjian yang tidak dipenuhi ketentuannya oleh salah satu pihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi sehingga harus mengganti kerugian terhadap pihak lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dipaksakan keberlakuannya melalui campur tangan pengadilan atau pihak yang berkompeten lainnya.¹⁵

Kajian mengenai asas *pacta sunt servanda* sehubungan dengan kepailitan berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU, pihak debitor yang melakukan wanprestasi dalam memenuhi perjanjian perdamaian dapat diajukan permohonan pembatalan perdamaian dan mengakibatkan kepailitan bagi debitor lalai.

Menurut Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

¹⁵ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85

menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Dalam melakukan penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.¹⁷ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

a. Menentukan Permasalahan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93

- b. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan
 - c. Menentukan Judul Penelitian
 - d. Membuat Latar Belakang
 - e. Menyusun Perumusan Masalah
 - f. Menentukan Tujuan Penelitian
 - g. Menyusun Kerangka Teoritis
 - h. Perumusan Hipotesa dan Saran
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yang artinya dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst.
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan, hasil karya ilmiah pakar hukum dan pendapat pakar hukum.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga dapat memahami maksudnya.

G. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan untuk dijadikan tempat memperoleh data berdasarkan kesesuaian dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.